

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Kemiskinan

2.1.1.1 Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan sering diartikan dengan ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan, dan papan. Kemiskinan merupakan situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Penduduk dinyatakan miskin bila ditandai dengan tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan, dan gizi serta kesejahteraan hidupnya yang rendah sehingga muncul lingkaran ketidakberdayaan. Menurut Soekanto dalam (Senewe dkk. 2021) kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Kemiskinan juga diartikan sebagai kondisi ketika seseorang tidak dapat mempertahankan skala hidup yang tinggi yang sesuai dengan standar yang ada di masyarakat baik karena pendapatan yang tidak memadai atau pengeluaran yang tidak bijaksana (Senewe dkk, 2021).

Menurut (Todaro& Smith, 2015) Berdasarkan jenisnya kemiskinan digolongkan menjadi empat sebagai berikut:

1. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang timbul akibat dari sebab kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau perilaku korporasi yang mendorong masyarakat miskin untuk tidak memiliki akses dalam perekonomian yang produktif. Konsep kemiskinan struktural membahas tentang bagaimana keterbatasan akses masyarakat terhadap sumber daya akibat suatu sistem sosial budaya maupun sistem sosial politik yang tercipta dalam suatu negara.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang muncul karena sudut pada yang menyeluruh yang menyebabkan seseorang dianggap miskin. Kemiskinan relatif tidak hanya melihat dari sudut pandang tingkat pendapatan masyarakat, namun lebih dari itu kemiskinan relatif dilihat dari seluruh aspek kehidupan seperti pengetahuan, lingkungan sosial, keahlian atau keterampilan, dan lain sebagainya. Dalam konsep ini kemiskinan bersifat dinamis. Hal ini berkesinambungan dengan adanya ketimpangan baik ketimpangan pendapatan maupun ketimpangan sosial. Ketimpangan selalu menggambarkan perbedaan perolehan akan sesuatu hal antara satu orang dengan yang lainnya. Artinya, selama ketimpangan itu ada dalam masyarakat, berdasarkan konsep kemiskinan relatif berarti kemiskinan akan selalu ada.

3. Kemiskinan Absolut

Menurut Sumodiningrat dalam (Putra, 2018) kemiskinan absolut merupakan kemiskinan yang muncul akibat diciptakannya suatu indikator kemiskinan yang mengukur batas minimal pembiayaan hidup yang manusiawi.

Seseorang dianggap miskin pada golongan kemiskinan absolut apabila perolehan pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Konsep kemiskinan absolut sering digunakan sebagai patokan oleh lembaga-lembaga pemerintahan seperti bank dunia. Hal ini dikarenakan dalam pengertian kemiskinan absolut, kemiskinan dapat diukur dengan nilai suatu garis kemiskinan dengan merepresentasikan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makan yang setara dengan 2.100 kalori per kapita Badan Pusat Statistik (2008). Garis kemiskinan internasional (*Internation Poverty Line*), kemiskinan absolut sebagai hidup dengan pendapatan kurang dari USD \$2,15 per hari (*World Bank* 2022).

4. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang muncul akibat dari tidak adanya kemauan seseorang untuk memperbaiki taraf hidupnya. Kemiskinan kultural terjadi akibat seseorang mempunyai sifat buruk seperti malas dan tidak mau berusaha memperbaiki kondisi kehidupannya, boros, dan susah berkembang dengan kemampuan sendiri bahkan dengan bantuan orang lain. Kemiskinan kultural merupakan kondisi yang menggambarkan masyarakat yang miskin mental. Hal ini berarti bahwa perlu adanya revolusi mental untuk menghilangkan kemiskinan dalam konsep kemiskinan kultural.

2.1.1.2. Ciri-Ciri Terjadinya Kemiskinan

Sebagaimana dituliskan kemiskinan menurut UNDP (*United Nations Development Programme* 2021) mempunyai beragam makna dari berbagai sisi kebutuhan hidup yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan
2. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan
3. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu pendidikan
4. Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha
5. Lemahnya perlindungan terhadap aset usaha dan perbedaan upah
6. Terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi
7. Terbatasnya akses terhadap air bersih
8. Lemahnya kapasitas kepemilikan dan penguasaan tanah
9. Memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap air bersih
10. Lemahnya jaminan rasa aman
11. Lemahnya partisipasi
12. Besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga
13. Buruknya tata kelola pemerintah yang menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas dalam pelayanan publik, meluasnya korupsi, dan rendahnya jaminan sosial terhadap masyarakat.

2.1.1.3. Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat kompleks yang disebabkan oleh banyak variabel dalam aktivitas ekonomi. Secara umum berikut adalah penyebab kemiskinan yang telah disederhanakan:

1. Tingkat pengangguran

Tingkat pengangguran memiliki hubungan positif terhadap kemiskinan dimana apabila suatu wilayah memiliki tingkat pengangguran yang tinggi dan individu yang mengalami nganggur dalam jangka waktu yang panjang, akan berpotensi menjadi miskin. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jacobus, Engka, & Kawung (2022) yang menghasilkan kesimpulan bahwa tingkat pengangguran secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kepulauan Siau Tanggulan dan Biaro.

2. Kualitas sumber daya manusia

Dengan diukur dari IPM Kualitas Sumber Daya Manusia yang tinggi akan mendorong pula pada tingkat produktivitas yang tinggi. Produktivitas yang tinggi akan menghindarkan masyarakat pada kemiskinan. Pada saat ini tantangan yang dihadapi bukan hanya sekedar menciptakan lapangan pekerjaan seluasluasnya tetapi juga perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk dapat memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja. Tersedianya lapangan pekerjaan serta sumber daya manusia yang berkualitas akan menciptakan sebuah transaksi pada pasar tenaga kerja sehingga permintaan atas tenaga kerja dapat terpenuhi. Sebaliknya jika kualitas sumber daya manusia rendah, meskipun lapangan kerja tersedia maka tidak akan terjadi transaksi dalam pasar tenaga kerja, karena sumber daya manusia yang ada tidak memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Kualitas sumber daya manusia sering diukur dengan indeks pembangunan manusia (IPM). Indeks pembangunan manusia adalah suatu data yang memperhitungkan tiga aspek penting yakni pendidikan, kesehatan, dan

ekonomi yang diukur dari indeks pengetahuan, indeks kesehatan, dan indeks pengukuran. Secara spesifik indeks pembangunan manusia (IPM) dapat digunakan untuk melihat apakah masyarakat dalam suatu wilayah memiliki kehidupan layak baik dari sisi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi (Giffari, M. 2016).

3. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah data yang dapat dijadikan sebuah alat ukur apakah suatu wilayah memiliki jumlah penduduk yang sedikit atau banyak. Data kepadatan penduduk adalah data yang memuat informasi berapa jumlah penduduk/km² dalam suatu wilayah. Kepadatan penduduk dapat mendeteksi apakah dalam suatu wilayah mengalami kelebihan penduduk. Kelebihan penduduk di suatu wilayah mengakibatkan sumber daya dalam suatu wilayah tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya sehingga hal ini menimbulkan kemiskinan. Kemiskinan dapat timbul karena kelangkaan sumber daya akibat penduduk yang terlalu padat pada suatu wilayah. Namun akibat yang terjadi akan berbeda jika banyaknya jumlah penduduk di suatu wilayah diikuti dengan kualitas SDM yang tinggi. Hal ini berakibat pada tingkat ekonomi yang akan menjadi lebih produktif sehingga individu dapat memperoleh pendapatan lebih tinggi, hal ini justru menimbulkan pengurangan tingkat kemiskinan pada wilayah yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi namun berkualitas. Hal ini menimbulkan dua asumsi pada hubungan kepadatan penduduk dengan kemiskinan di suatu wilayah. Artinya pengaruh kepadatan penduduk terhadap kemiskinan akan bergantung pada bagaimana kualitas sumber daya manusia yang menempati wilayah tersebut, apakah mampu mendorong wilayah tersebut pada perekonomian yang lebih

produktif atau tidak. Oleh karena itu terdapat hubungan antara kepadatan penduduk dengan tingkat kemiskinan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dita C. & Legowo M. (2022) yang menghasilkan kesimpulan bahwa kepadatan penduduk memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Penelitian lainnya dilakukan oleh Nyompa S., Maru R., & Amal (2019) menghasilkan kesimpulan yang sama yang dilakukan di Kota Makasar.

4. Ketimpangan

Dalam skala mikro, ketidaksamaan kepemilikan terhadap sumber daya sehingga menimbulkan disparitas pendapatan merupakan salah satu penyebab terjadinya kemiskinan. Masyarakat sejahtera adalah kondisi dimana seseorang lebih banyak memiliki pilihan dalam hidupnya. Memiliki pendapatan lebih rendah dari individu lain dan mengalami ketimpangan lainnya merupakan keadaan yang akan membatasi pilihan seseorang sehingga merasa miskin dan dianggap miskin. Ketimpangan pendapatan merupakan akibat dari adanya ketimpangan - ketimpangan lain yang terjadi di suatu negara terutama negara berkembang. Misalnya ketimpangan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah membuat masyarakat kesulitan untuk memperoleh akses terhadap ekonomi produktif yang akhirnya sulit untuk mencapai pemerataan pendapatan. Contoh lainnya adalah adanya ketimpangan gender yang menimbulkan adanya gap antara hak, *privilege*, atau kepemilikan antara laki-laki dan perempuan sehingga menimbulkan keterbatasan akses sumber daya. Hal yang umum terjadi seperti, posisi dalam karir yang menimbulkan gap skala upah serta menimbulkan ketimpangan pendapatan

antara laki-laki dan perempuan merupakan penyebab dari kemiskinan (Suparman, S., et al. 2021).

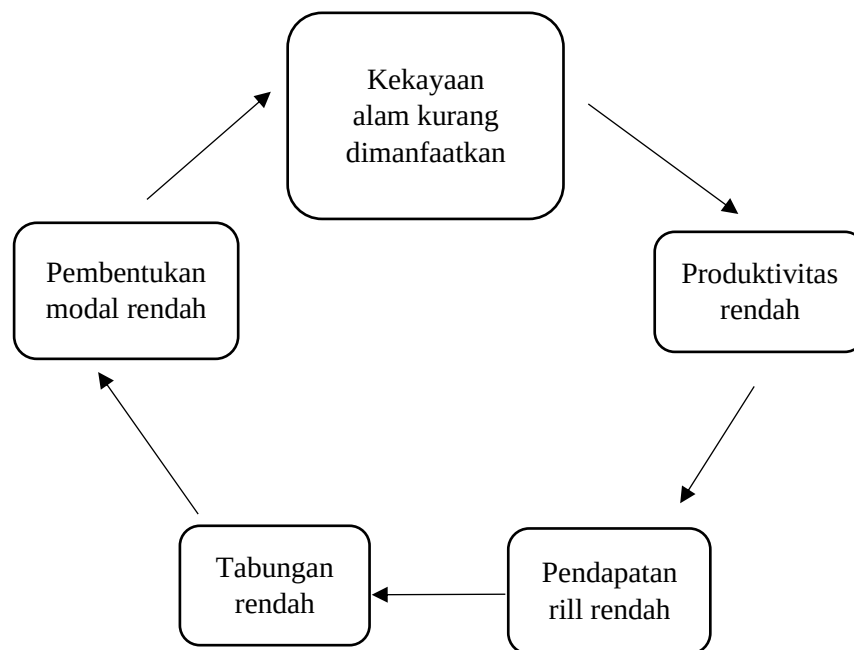
5. Dana penanggulangan kemiskinan

Akses modal merupakan faktor terpenting untuk menghindarkan masyarakat dari kemiskinan. Akses modal yang mudah akan mendorong pada terciptanya ekonomi yang produktif. Sehingga menciptakan banyak lapangan pekerjaan yang akhirnya demand akan tenaga kerja meningkat. Hal ini akan mendorong lebih banyak partisipasi angkatan kerja sehingga pendapatan masyarakat akan meningkat yang akhirnya menghindarkan masyarakat dari kemiskinan. Dana penanggulangan kemiskinan adalah salah satu modal yang harus dikeluarkan pemerintah untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Dana penanggulangan kemiskinan dialokasikan terhadap program-program pengentasan kemiskinan seperti bantuan keuangan untuk pemerintah daerah sehingga dapat menyediakan fasilitas umum untuk kelayakan hidup masyarakat, serta bantuan sosial untuk masyarakat sehingga setidaknya dapat mengurangi tekanan pengeluaran masyarakat miskin. Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Habimana, dkk 2021) yang menghasilkan kesimpulan bahwa program bantuan langsung tunai memiliki pengaruh yang sederhana terhadap tingkat kemiskinan. Hasil penelitian yang sama 24 diperoleh oleh penelitian-penelitian lainnya yang dilakukan oleh Safuridar & Suci N.D. (2017) yang dilakukan di Kabupaten Aceh Timur menghasilkan kesimpulan bahwa dana penanggulangan kemiskinan berdampak menekan biaya pengeluaran masyarakat.

2.1.1.4. Lingkaran Setan Kemiskinan

Lingkaran setan kemiskinan merupakan lingkaran setan pengaruh timbal balik yang berujung pada kondisi kemiskinan yang terus menerus dan sulitnya suatu Negara membawa pembangunan ekonominya ke tingkat yang lebih tinggi (Arsyad, 2015). Teori ini dikemukakan oleh Ragnar Nurkse mengatakan bahwa kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pembangunan di masa lalu. Namun, kemiskinan juga menjadi penghambat pembangunan di masa yang akan datang.

Penyebab lain terjadinya kemiskinan adalah karena lingkaran setan kemiskinan (*Vicious Circle Of Poverty*). Menurut Nurkse (1953) dalam (Arsyad, 2015) menyatakan bahwa lingkaran setan kemiskinan merupakan pola yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya sehingga menyebabkan kondisi dimana sebuah negara akan tetap berada pada kategori miskin dan akan mengalami kesulitan untuk mencapai pembangunan yang lebih tinggi. Menurut Nurske (1953), lingkaran kemiskinan muncul bukan karena tidak terdapat pembangunan pada suatu negara, tetapi permasalahan ini muncul karena adanya halangan yang besar dalam proses pembentukan modal.



Sumber: Arsyad (2015:113)

Gambar 2.1
Lingkaran Kemiskinan Versi Nurkse

Meier dan Baldwin (1957) dalam Arsyad (2015) menyatakan bahwa konsep tentang lingkaran kemiskinan muncul akibat hubungan saling mempengaruhi antara kondisi masyarakat tradisional yang belum mampu memanfaatkan secara penuh sumber daya yang tersedia. Konsep lingkaran kemiskinan menganggap bahwa suatu Negara yang mengalami kondisi kemiskinan secara terus menerus disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut:

1. Ketidakmampuan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya dengan baik.
2. Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan produktivitas rendah.
3. Kurangnya faktor pendukung kegiatan penanaman modal.

Keterbelakangan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia menyebabkan produktivitas menurun karena rendahnya aktivitas supply dan

demand pada pasar tenaga kerja, sebagai akibat tidak bertemunya permintaan dan penawaran pada pasar tenaga kerja. Oleh sebab itu maka akan semakin rendah pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat, sehingga masyarakat tidak mempunyai dana untuk ditabung maupun diinvestasikan yang akhirnya menimbulkan tingkat saving dan tingkat investasi rendah.

2.1.1.5 Teori-Teori Kemiskinan

1. Teori Malthus

Teori ini mengatakan terjadinya kemiskinan kronis merupakan akibat dari pertumbuhan penduduk yang pesat pada suatu negara. Pertumbuhan penduduk akan meningkat dengan pesat dan cepat menurut deret ukur, sementara dengan proses bertambahnya hasil yang berkurang dari jumlah yang tetap pada faktor produksi seperti tanah, maka ketersediaan pangan meningkat menurut deret hitung.

2. Teori Lingkaran Setan Kemiskinan

Teori ini dikemukakan oleh Nurkse, yang menyatakan bahwa kemiskinan terjadi karena kondisi pasar yang jauh dari sempurna, modal terbatas, dan sumber daya manusia yang rendah, sehingga menyebabkan produktivitas rendah.

3. Teori Paradigma Neo-Liberal

Teori ini menyatakan bahwa kemiskinan merupakan permasalahan individu, bukan kelompok, yang disebabkan oleh kelemahan atau pilihan hidup individu yang bersangkutan. Kemiskinan akan hilang apabila kekuatan pasar diperluas sebesar-besarnya dan pertumbuhan ekonomi ditingkatkan setinggi-tingginya.

3. Teori Paradigma Sosial-Demokrat

Teori menyatakan bahwa kemiskinan merupakan permasalahan structural, bukan individu, yang disebabkan oleh adanya ketidakadilan dan ketimpangan pendapatan dalam masyarakat akibat dari terbatasnya akses kelompok tertentu terhadap berbagai sumber kemasyarakatan. Kesenjangan merupakan prasyarat penting dalam memperoleh kemandirian dan kebebasan.

2.1.2 Urbanisasi

2.1.2.1 Pengertian Urbanisasi

Menurut Tjiptoherijanto (2016) dalam Urbanisasi dan Pengembangan Kota di Indonesia, mengatakan pengertian urbanisasi yang sesungguhnya adalah proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan (*urban area*). Perkotaan (*urban area*) tidak sama artinya dengan kota (*city*). Urbanisasi sendiri berasal dari kata urban yang berarti sifat perkotaan. Di Indonesia didefinisikan sebagai migrasi masyarakat pedesaan ke kota, urbanisasi didefinisikan sebagai proses pembentukan kehidupan perkotaan yang berbeda dari kehidupan pedesaan dalam konteks ekonomi, masyarakat dan psikologi masyarakat. (Soetomo, 2009). Oleh karena itu konsep urbanisasi didefinisikan sebagai suatu proses perubahan orang dan daerah di kawasan non-urban menjadi kawasan perkotaan. Secara spasial, ini diyakini sebagai proses diferensiasi dan spesialisasi penggunaan ruang, di mana situs-situs tertentu menerima proporsi pemukim dan fasilitas yang tidak proporsional. Teori tersebut dikuatkan oleh PJM Nas (2010), yang mendeskripsikan bahwa urbanisasi adalah proses terbentuknya kota-kota dari mobilitas masyarakat yang didorong oleh perubahan-perubahan struktural, sehingga di desa-desa yang dulunya diasosiasikan

dengan struktur kehidupan agraris dan sifat kehidupan, secara bertahap atau progresif memperoleh karakteristik perkotaan.

Dapat dikatakan bahwa mobilitas penduduk dari pedesaan ke wilayah perkotaan merupakan salah satu penyebab peningkatan penduduk di wilayah perkotaan. Urbanisasi sendiri diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu:

1. Mobilitas permanen dan
2. Mobilitas sementara.

Perpindahan dari desa ke kota ini seringkali disebabkan karena pengaruh kuat berupa ajakan, media massa, impian pribadi, kebutuhan ekonomi yang mendesak, dan lain-lain (Todaro, M. P. 2011).

Secara demografis, urbanisasi adalah penduduk perkotaan yang dapat diukur dengan melihat persentase penduduknya yang tinggal di daerah perkotaan (urban area) (Muta'ali: 2015: 17). Pada sudut pandang Geografi, urbanisasi dilihat dari segi distribusi, difusi perubahan, dan pola menurut waktu dan tempat (Bintarto, 1987: 21). Konsep urbanisasi dibagi menjadi dua arti: Pertama, urbanisasi dalam arti sempit, yaitu menyangkut pertambahan kota dan pentingnya kota terhadap kehidupan masyarakat. Kedua, urbanisasi dalam arti luas yaitu menyangkut suatu proses sosio-ekonomis yang mempunyai banyak segi (Bintarto, 1987: 25). Keadaan di wilayah perkotaan yang mengalami adanya fenomena urbanisasi yang tidak terkontrol, akan mengakibatkan banyaknya masalah baru seperti meningkatnya penyimpangan tindakan karena kemiskinan, pengangguran besar-besaran, peningkatan kawasan kumuh, dan lain sebagainya. Dari hal tersebut, urbanisasi dapat dipandang sebagai suatu indikator dalam menentukan tingkat

perkembangan kota baik dalam konteks ekonomi maupun sosial. Dengan begitu, dimungkinkan untuk lebih melihat bentuk atau pemahaman urbanisasi dan dampaknya terhadap kehidupan di kota.

Dalam literatur pembangunan ekonomi, urbanisasi masyarakat pedesaan ke kota dilihat sebagai keuntungan, karena surplus pekerja pedesaan secara bertahap menarik diri untuk memenuhi permintaan tenaga kerja perkotaan karena perkembangan sektor industri. Proses ini bermanfaat secara sosial. Hal ini karena angkatan kerja bergerak dari tempat di mana produk marginal mendekati nol ke tempat di mana produk marginal tidak hanya positif karena akumulasi modal dan kemajuan teknologi, tetapi juga berkembang pesat (Suntajaya, I. 2014).

2.1.2.2 Teori Urbanisasi

1. Teori The First City (Carter)

Menurut Carter (dalam Potter) pada buku karangan Soetomo (2009), menjelaskan bahwa kota atau proses urbanisasi terjadi karena ada empat inisial di dunia. Pertama, bahwa kota tercipta karena adanya kesuburan tanah suatu wilayah yang menciptakan surplus pertanian. Perkembangan daerah yang subur akan melahirkan kelompok elite yang mengatur masyarakat agraris. Mereka akan mengatur, memberi perlindungan, dan jasa pelayanan sosial lainnya, dan mereka menguasai masyarakat agraris dan hidup dari pajak para petani. Kehidupan seperti ini akan memunculkan konsep awal kota pemerintahan, dan perkembangan pelayanan publik. Dalam kehidupan kota ini juga berkembang kegiatan komersial non pertanian, seperti perdagangan, jasa-jasa, dan penguasa memberi fasilitas dengan memungut pajak.

Kedua, kota tercipta dari adanya alur perdagangan. Dimana kota-kota pertama di Indonesia terbentuk dari adanya alur perdagangan, seperti di wilayah pantai, dan muara sungai sebagai simpul pertukaran barang dari pedalaman dan barang dari luar pulau. Adanya urbanisasi atau perubahan suatu wilayah menjadi perkotaan yang disebabkan oleh adanya perkembangan simpul kolektor, dan distributor barang dari, dan menuju suatu wilayah, sehingga menjadikan suatu wilayah sebagai titik kekuatan ekonomi yang menciptakan kesempatan tenaga kerja yang beragam, dan tempat tersebut akan menciptakan kehidupan perkotaan. Kota akan selalu mempunyai kekuatan ekonomi basis karena perannya sebagai kekuatan wilayah. Dan akan menciptakan migrasi ke tempat tersebut yang akan menciptakan kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi berantai, sehingga menciptakan kekuatan domestik. Kekuatan ini sesungguhnya akan memenuhi kebutuhan kehidupan penduduknya yang tidak hanya menyangkut kebutuhan materi, tetapi kebutuhan immaterial yang harkat kemanusiaan.

Ketiga, kota terbentuk dari kepentingan militer. Dimana kota akan terbentuk dari kemauan kelompok militer untuk tujuan kebutuhan pertahanan, dan strategi militer. Contohnya seperti kota-kota militer Roma yang dikenal dengan *Castrum* yang tersebar di wilayah luas yang dibentuk Perdamaian Romawi (*Pax Romana*).

Keempat, kota terbentuk dari kekuatan agama sebagai pusat terbentuknya kota, hal ini dapat kita lihat pada kota Mekah, dan kota-kota agama lainnya yang menjadi pusat perkembangan fasilitas agama yang menciptakan fasilitas pendukungnya, dan permukiman dengan fasilitas yang menunjang kegiatan seluruh masyarakat yang akan mendatangnya.

Dari teori ini dapat disimpulkan bahwa urbanisasi atau perubahan suatu daerah menjadi perkotaan, akan berdampak baik pada kesejahteraan masyarakat sekitar. Hal ini disebabkan karena adanya perkembangan kegiatan agraris, perdagangan, kekuatan militer, dan pusat agama yang menciptakan kesempatan kerja yang lebih beragam, menciptakan kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi yang berantai. Lebih banyak lagi masyarakat yang dapat meningkatkan standar hidup mereka. Karena mereka terlibat dalam aktifitas perekonomian yang akan menurunkan kemiskinan yang ada.

2. Teori Migrasi Todaro

Menurut Todaro, M. P. (2011). Migrasi dari desa ke kota memiliki beberapa karakteristik. Pertama, migrasi didorong oleh pemikiran rasional seseorang dalam menentukan manfaat dan biaya ekonomi yang ada, meski semua menyangkut masalah keuangan tetapi juga mempertimbangkan psikologis mereka. Kedua, Keputusan seseorang untuk melakukan migrasi tergantung dari pertimbangan selisih atau perbedaan antara upah pedesaan dan upah perkotaan yang diharapkan, bukan selisih aktual, melainkan selisih yang diharapkan ditentukan oleh interaksi dua variabel, selisih aktual upah kota-desa dan probabilitas untuk dapat pekerjaan di perkotaan. Ketiga, probabilitas mendapatkan pekerjaan di perkotaan berkaitan dengan tingkat lapangan pekerjaan perkotaan, sehingga berbanding terbalik dengan tingkat pengangguran yang ada di perkotaan. Keempat, tingkat migrasi yang melebihi tingkat pertumbuhan kesempatan kerja tidak hanya mungkin terjadi, tetapi rasional, dan cenderung terjadi jika selisih pendapatan perkotaan dan pedesaan semakin besar.

Teori migrasi Todaro dapat disimpulkan bahwa urbanisasi akan menurunkan kemiskinan yang ada, ketika kesempatan untuk mendapatkan penghasilan bersih di kota lebih tinggi ketimbang penghasilan yang mereka dapatkan sekarang di desa.

3. Teori Migrasi Everett S. Lee

Keputusan seseorang dalam melakukan migrasi selalu terkandung keinginan untuk memperbaiki kondisi kehidupan mereka sekarang, sehingga migrasi dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor demi tercapainya tujuan mereka.

Terdapat empat faktor yang menjadi perhatian dalam kasus migrasi penduduk, yaitu:

1. Faktor – faktor dari daerah asal, kondisi yang membuat seseorang ingin meninggalkan tempat tinggal mereka, seperti kemiskinan, pengangguran, atau kekurangan fasilitas.
2. Faktor – faktor yang ada pada daerah tujuan migrasi, Kondisi yang menarik seseorang untuk pindah ke tempat baru, seperti peluang kerja yang lebih baik, kualitas hidup yang lebih tinggi, atau pendidikan yang lebih baik.
3. Faktor rintangan yang menghambat migrasi, Hambatan yang mungkin menghalangi seseorang untuk melakukan migrasi, seperti biaya migrasi, kurangnya informasi, atau peraturan yang membatasi.
4. Faktor – faktor individual, Lee menekankan bahwa keputusan migrasi juga dipengaruhi oleh pertimbangan pribadi seperti pengalaman sebelumnya, harapan, dan motivasi individual.

Teori migrasi menekankan bagaimana faktor individu lah yang menentukan seseorang melakukan migrasi atau tidak, disamping faktor pendorong, penarik, dan rintangan. Sehingga pada akhirnya migrasi dari desa ke kota bertujuan untuk memperbaiki kondisi kehidupan mereka. Ketika perbaikan kondisi perekonomian bisa dicapai maka akan berdampak pada tingkat kemiskinan yang akan semakin berkurang (Lee, E. S. 1966).

4. Teori Purbacaraka Tjiptoherijanto

Urbanisasi dan Pengembangan Kota di Indonesia, urbanisasi didefinisikan sebagai proporsi penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Definisi ini menggambarkan urbanisasi sebagai perubahan dalam struktur populasi di mana semakin banyak penduduk berpindah dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan, sehingga meningkatkan jumlah dan persentase penduduk yang tinggal di kota-kota (Tjiptoherijanto, 2016).

Tjiptoherijanto menggunakan rumus berikut untuk mengukur tingkat urbanisasi:

$$U = \frac{JP_k}{JP} \times 100\%$$

(Tjiptoherijanto, 2016)

Keterangan:

U = Tingkat urbanisasi (%)

JP_k = Jumlah penduduk yang tinggal di daerah perkotaan

JP = Jumlah penduduk total

Untuk menentukan apakah suatu wilayah dapat dikategorikan sebagai daerah perkotaan, Tjiptoherijanto menetapkan kriteria berikut:

1. Kepadatan Penduduk: Daerah tersebut harus memiliki kepadatan penduduk minimal 500 jiwa per kilometer persegi.
2. Sektor Pekerjaan: Proporsi rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian harus 25 persen atau kurang.
3. Fasilitas Perkotaan: Daerah harus memiliki delapan atau lebih jenis fasilitas perkotaan, seperti sekolah, rumah sakit, pasar, dan fasilitas umum lainnya.

2.1.2.3 Penyebab Urbanisasi

Urbanisasi adalah fenomena perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke perkotaan yang sering kali dipicu oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Proses ini biasanya terjadi akibat ketidakpuasan penduduk terhadap kondisi kehidupan di desa, seperti kemiskinan, kurangnya lapangan pekerjaan, dan terbatasnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Ketika penduduk merasa bahwa peluang untuk meningkatkan taraf hidup lebih besar di kota, mereka cenderung meninggalkan desa untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Namun, urbanisasi juga dapat menyebabkan berbagai masalah di kota, seperti kepadatan penduduk, kemiskinan perkotaan, dan tekanan pada infrastruktur dan layanan publik (Todaro & Smith. 2015). Dengan demikian, urbanisasi menciptakan siklus yang kompleks antara penyebab dan akibat, di mana kondisi di daerah asal mendorong perpindahan, sementara kondisi di daerah tujuan dapat memperburuk tantangan sosial dan ekonomi.

Faktor-faktor penyebab urbanisasi diantaranya meliputi:

1. Hilangnya sumber daya hayati yang meruntuhkan daya dukung lingkungan sehingga menjadikan beberapa bahan baku yang semakin sulit diperoleh, seperti sumber pangan, bahan pertanian atau bahan lain (hasil dari alam) di daerah asalnya
2. Keterbatasan lapangan pekerjaan di tempat asal, seperti terlihat dari para petani yang kehilangan lahan tanam subur yang diakibatkan dari adanya pembangunan infrastruktur daerah
3. Adanya tekanan, seperti dari politik, agama, dan suku untuk mencampuri hak-hak manusia di daerah asalnya
4. Alasan pendidikan, pekerjaan maupun pernikahan
5. Adanya bencana alam, seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, tsunami, kekeringan atau wabah penyakit yang melanda daerah asalnya
6. Upah yang rendah tingkat upah yang rendah di daerah asal menjadi faktor pendorong bagi penduduk untuk mencari pekerjaan dengan upah yang lebih tinggi di kota (Ischak, 2001).

Secara umum, urbanisasi terjadi karena adanya ketimpangan pembangunan antara daerah perkotaan dan pedesaan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun infrastruktur. Pemerataan pembangunan di seluruh wilayah diharapkan dapat mengurangi laju urbanisasi yang terlalu cepat.

2.1.3 Kepadatan Penduduk

2.1.3.1 Pengertian Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk per satuan unit wilayah (Jiwa/Km²). Wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi umumnya adalah pusat permukiman, pusat peradaban, dan pusat aktivitas sosial ekonomi (Pusat Pertumbuhan). Kepadatan penduduk dapat dihitung dengan jumlah penduduk suatu wilayah dibagi luas wilayah (Muta'ali, 2015: 25). Dengan demikian kepadatan penduduk diartikan dengan, kepadatan penduduk di suatu daerah dibandingkan dengan luas tanah yang didiami dinyatakan dengan banyaknya penduduk per km².

$$\text{Kepadatan Penduduk} = \frac{\text{Jumlah penduduk}}{\text{Luas wilayah km}^2}$$

(Badan Pusat Statistik, 2021)

Dalam kepadatan penduduk terdapat dua ukuran yaitu dengan membandingkan banyaknya penduduk dengan seluruh tanah dan banyaknya penduduk dibanding luas tanah yang dapat ditanami. Banyaknya penduduk dapat pula dinyatakan sebagai rata-rata banyaknya penduduk per rumah tangga atau per ruangan, untuk menunjukkan kesesakan/kepadatan. Berdasarkan jenisnya kepadatan penduduk dibedakan menjadi tiga. Yang pertama kepadatan penduduk berdasarkan lahan pertanian. Jenis kepadatan penduduk ini juga dibedakan menjadi dua yakni kepadatan penduduk agraris yang merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian dengan luas lahan pertanian. Sementara itu kepadatan penduduk fisiologis merupakan perbandingan jumlah penduduk total, baik berprofesi sebagai petani maupun yang bukan berprofesi sebagai petani, dengan luas lahan pertanian. Yang kedua kepadatan penduduk

umum atau aritmatik, merupakan jumlah penduduk rata-rata yang menempati suatu wilayah per km² (Smith,D.A.2001). Kepadatan penduduk aritmatik adalah perbandingan antara jumlah penduduk total secara keseluruhan tanpa kecuali dengan luas wilayah, baik wilayah lahan pertanian maupun bukan. Jenis kepadatan penduduk ini yang sering digunakan dalam sebuah penelitian (Jones, R. E., & Ferguson, J.P. 2015). Yang ketiga kepadatan penduduk ekonomi, merupakan perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah menurut kapasitas produksinya. Jadi dalam jenis ini yang dihitung adalah jumlah penduduk dalam jiwa banding luas lahan produksi (Boserup, E. 1965).

2.1.3.2 Teori Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk memiliki dampak yang signifikan terhadap kemiskinan, dan beberapa teori yaitu:

1. Teori Marxist

Karl Marx berpendapat bahwa kepadatan penduduk menyebabkan tekanan pada lapangan pekerjaan. Dengan semakin banyaknya penduduk, lapangan pekerjaan menjadi terbatas, yang mengarah pada pengangguran dan kemiskinan. Ini menunjukkan bahwa kepadatan penduduk dapat memperburuk kondisi ekonomi masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak terdidik atau memiliki keterampilan rendah (Marx, 1867).

2. Teori Lingkaran Kemiskinan

Konsep ini menyatakan bahwa kemiskinan dan kepadatan penduduk saling terkait dalam siklus yang sulit diputus. Kepadatan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan keterbatasan sumber daya, yang pada gilirannya meningkatkan

kemiskinan. Sebaliknya, kemiskinan dapat menghambat akses terhadap pendidikan dan kesehatan, yang penting untuk mengurangi kepadatan penduduk.

Kepadatan penduduk memiliki pengaruh yang kompleks terhadap kemiskinan. Meskipun dalam beberapa kasus peningkatan kepadatan dapat berkontribusi pada penurunan kemiskinan melalui peningkatan kesempatan kerja, dalam banyak situasi, kepadatan yang tinggi juga dapat memperburuk kondisi kemiskinan melalui tekanan pada sumber daya, lapangan pekerjaan dan infrastruktur public (Todaro & Smith, 2015). Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang efektif untuk mengelola pertumbuhan penduduk dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk.

2.1.3.3 Penyebab Kepadatan Penduduk

Tingkat kepadatan penduduk di suatu daerah tidak merata bergantung pada berbagai faktor seperti letak geografis, iklim, akses yang baik dan lain sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepadatan penduduk:

1. Tingkat kesuburan tanah

Tingkat kesuburan tanah dianggap sebuah wilayah yang strategis untuk dijadikan sebagai tempat tinggal karena mereka akan lebih mudah dalam bercocok tanam. Hal ini akan memberikan peningkatan jumlah penduduk dengan jenis kepadatan penduduk agraris. Sebaliknya jika tingkat kesuburan tanah rendah maka individu kurang berminat tinggal di wilayah tersebut (Bilsborrow, R. E., & De Lary, P. 1991).

2. Bentuk lahan

Bentuk lahan yang cenderung berbukit dan tidak rata memiliki rentang antar rumah yang jauh. Bentuk lahan seperti ini biasanya terletak di daerah dataran tinggi atau wilayah pegunungan. Selain itu daerah dataran tinggi memiliki resiko bencana alam yang lebih tinggi misalnya longsor dan bencana alam lainnya. Hal ini membuat daerah dengan lahan yang tidak rata atau dataran tinggi tidak banyak memiliki jumlah penduduk (Mandal, R. B. 1980).

3. Iklim yang baik

Penelitian ini menunjukkan bahwa wilayah dengan iklim yang baik, seperti iklim yang stabil dan tidak ekstrem, cenderung memiliki populasi yang lebih padat karena lebih kondusif untuk kegiatan ekonomi dan kehidupan manusia. Sebaliknya, wilayah dengan iklim yang buruk atau ekstrem, seperti daerah yang sangat panas, dingin, atau rawan bencana alam, cenderung memiliki kepadatan penduduk yang lebih rendah (Henderson, J. V., 2012)

Indonesia termasuk ke dalam negara yang memiliki iklim yang baik dan cuaca yang tidak ekstrem. Hal ini disebabkan oleh letak geografis Indonesia yang berada pada garis khatulistiwa sehingga sinar matahari selalu vertikal. Hal ini yang menyebabkan di Indonesia hanya terjadi dua musim, musim hujan dan musim kemarau. Negara-negara yang memiliki jarak yang jauh dari garis khatulistiwa cenderung memiliki iklim dan cuaca yang ekstrem, sehingga bisa memiliki empat musim. Dasarnya manusia akan lebih bisa bertahan hidup dalam cuaca dan iklim yang tidak ekstrem, di luar dari proses pembiasaan yang dilakukan manusia. Hal ini berakhir pada kesimpulan bahwa wilayah dengan iklim dan cuaca yang stabil lebih

diminati untuk dihuni, artinya wilayah dengan kriteria tersebut memiliki jumlah penduduk yang lebih tinggi.

4. Pusat pemerintahan

Daerah yang berada pada pusat pemerintahan cenderung memiliki jumlah penduduk yang tinggi. Hal ini dikarenakan wilayah yang menjadi pusat pemerintahan biasanya memiliki akses yang baik seperti sarana prasarana yang menjadi fasilitas umum misalnya transportasi umum, jalan, fasilitas kesehatan, fasilitas kependudukan, fasilitas pendidikan dan lain sebagainya. Selain itu masyarakat yang tinggal di wilayah yang dekat dengan pusat pemerintahan sering kali lebih dulu merasakan pembangunan dan program pemerintah misalnya di Jakarta sudah memiliki transportasi kereta cepat sebelum daerah lainnya. Hal-hal seperti ini juga berlaku pada daerah yang menjadi pusat kegiatan ekonomi dan industri (Glaeser, E. L., & Gottlieb, J. D, 2009).

5. Pusat kegiatan ekonomi dan industry

Mudahnya akses pada wilayah dengan karakteristik ini juga memiliki jumlah permintaan akan tenaga kerja yang tinggi. Hal ini menyebabkan orang-orang yang berasal dari daerah lain memilih pindah dan beberapa memilih menetap. Wilayah yang dijadikan sebagai pusat ekonomi dan industri dianggap sebagai wilayah yang lebih mudah untuk memperoleh kegiatan kerana wilayah ini memiliki tingkat produktifitas yang tinggi. Sehingga wilayah yang menjadi pusat ekonomi dan industri cenderung memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi.

Kepadatan penduduk dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat kesuburan tanah, bentuk lahan, iklim, serta kedekatan dengan pusat pemerintahan

dan pusat kegiatan ekonomi. Daerah dengan kondisi tanah yang subur, iklim yang stabil, serta akses yang baik terhadap pusat-pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan cenderung memiliki tingkat kepadatan penduduk yang lebih tinggi. Sebaliknya, wilayah dengan topografi yang tidak mendukung dan sumber daya yang terbatas mengalami kepadatan penduduk yang lebih rendah. Kepadatan penduduk juga memiliki dampak kompleks terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Di satu sisi, peningkatan kepadatan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kesempatan kerja dan produktivitas. Namun, di sisi lain, kepadatan yang tinggi juga dapat memperburuk kemiskinan jika tidak diimbangi dengan pengelolaan sumber daya yang efektif dan kebijakan pembangunan yang memadai.

Kebijakan pembangunan yang berkelanjutan perlu dirancang untuk mengelola kepadatan penduduk dengan baik. Penataan ruang yang tepat, penyediaan infrastruktur yang memadai, serta distribusi sumber daya yang adil menjadi kunci untuk memastikan bahwa pertumbuhan penduduk dapat diselaraskan dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Rodrik, D.2013).

2.1.4 Rasio Ketergantungan

2.1.4.1 Pengertian Rasio Ketergantungan

Menurut BPS (2021) Rasio Ketergantungan (*dependency ratio*) didefinisikan sebagai rasio antara kelompok penduduk umur 0-14 tahun yang termasuk dalam kelompok penduduk belum produktif secara ekonomis dan kelompok penduduk umur 65 tahun ke atas termasuk dalam kelompok penduduk

yang tidak lagi produktif dengan kelompok penduduk umur 15-64 tahun termasuk dalam kelompok produktif.

Secara matematis rasio ketergantungan juga dirumuskan sebagai berikut:

$$RK = \frac{P_{(0-14)} + P_{65+}}{P_{(15-64)}} 100\%$$

Keterangan:

RK = Rasio ketergantungan

$P_{(0-14)}$ = Jumlah penduduk usia muda (0-14 tahun)

P_{65+} = Jumlah penduduk usia tua (65 tahun ke atas)

$P_{(15-64)}$ = Jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun)

Semakin tinggi angka *dependency ratio* menggambarkan semakin berat beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif karena harus mengeluarkan sebagian pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan penduduk usia non produktif sehingga pendapatan yang ada lebih banyak digunakan untuk konsumsi daripada menabung dan mengakibatkan penurunan dalam pembentukan modal dan akan menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi.

2.1.4.2 Teori Rasio Ketergantungan

Menurut buku dari Teori Harrod-Domar (1940) mengemukakan bahwa, tingkat pertumbuhan pendapatan nasional akan secara langsung atau secara positif berbanding lurus dengan rasio tabungan karena identitas dalam perhitungan pendapatan nasional adalah $S=I$ dengan S adalah tingkat tabungan dan I adalah tingkat investasi dan menurut Solow, jika suatu negara menyisihkan sebagian besar pendapatannya ke dalam tabungan dan investasi maka negara tersebut akan memiliki persediaan modal pada kondisi mapan dan tingkat pendapatan yang tinggi.

Sedangkan jika suatu negara hanya menabung dan menginvestasikan sebagian kecil dari pendapatannya maka modal dalam kondisi mapan dan pendapatannya akan rendah. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Rostow bahwa pembangunan akan mudah diciptakan hanya jika jumlah tabungan ditingkatkan. Tingkat tabungan yang tinggi akan mengakibatkan tingkat investasi yang tinggi pula sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan oleh kenaikan pendapatan nasional (Mankiw, 2003).

2.1.4.3 Penyebab Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang tidak produktif seperti (anak-anak dan lansia) dengan jumlah penduduk yang produktif. Berikut adalah beberapa penyebab rasio ketergantungan (Todaro & Smith, 2015):

1. Kemiskinan

Kepadatan penduduk sering kali berhubungan langsung dengan peningkatan angka kemiskinan. Daerah dengan kepadatan tinggi biasanya mengalami kesulitan dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan akses terhadap layanan dasar, yang menyebabkan banyak penduduk terjebak dalam kemiskinan.

2. Degradasi lingkungan

Kepadatan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti pencemaran, penggundulan hutan, dan penurunan kualitas tanah. Hal ini berdampak pada ketersediaan sumber daya alam dan kualitas hidup masyarakat.

3. Kesulitan mencari lapangan pekerjaan

Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, persaingan untuk mendapatkan pekerjaan semakin ketat. Banyak individu yang tidak dapat menemukan pekerjaan yang layak, yang berkontribusi pada tingkat pengangguran yang tinggi.

4. Tempat tinggal yang tidak layak

Kepadatan penduduk sering kali menyebabkan masalah perumahan, di mana banyak orang tinggal di tempat yang tidak layak atau kumuh. Hal ini menciptakan tantangan bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

5. Kesehatan dan kesejahteraan

Dengan meningkatnya jumlah penduduk, akses terhadap layanan kesehatan dan fasilitas sosial menjadi terbatas. Ini dapat menyebabkan penurunan kualitas kesehatan masyarakat dan meningkatkan risiko penyebaran penyakit.

6. Ketersediaan sumber daya

Kepadatan penduduk dapat mengakibatkan tekanan pada sumber daya seperti air bersih, pangan, dan lahan. Hal ini mempersulit pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

7. Persebaran penduduk yang tidak merata

Konsentrasi penduduk yang tinggi di daerah tertentu, seperti Pulau Jawa, menyebabkan ketidakseimbangan dalam distribusi sumber daya dan infrastruktur, memperburuk masalah kependudukan di wilayah lain yang kurang padat.

8. Tingkat kelahiran tinggi

Tingginya angka kelahiran berkontribusi pada peningkatan jumlah penduduk yang belum dewasa, sehingga meningkatkan rasio ketergantungan. Ini sering terjadi di negara-negara berkembang, di mana keluarga cenderung memiliki lebih banyak anak untuk mendukung perekonomian rumah tangga

Penyebab-penyebab ini menunjukkan bahwa rasio ketergantungan dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, dan demografis yang saling terkait.

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan *orisinalitas* dari penelitian. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang dikaji:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No (1)	Penulis/Tahun/Judul (2)	Persamaan (3)	Perbedaan (4)	Hasil Penelitian (5)	Sumber (6)
1.	Analisis Pengaruh Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Ketergantungan Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Sarolangun. Rohana, R., Junaidi, J., & Prihanto, P. H. (2017).	-Rasio Ketergantungan -Tingkat Kemiskinan	-Pertumbuhan Penduduk	Secara parsial pertumbuhan penduduk tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Sarolangun, sedangkan Dependency ratio memiliki berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Sarolangun.	e-Jurnal Ekonomi Sumber daya dan Lingkungan Vol.6. No.2, (Mei-Agustus (2017)
2.	Pengaruh pertumbuhan ekonomi, indeks	-Kepadatan Penduduk	-Indeks Pembangunan Manusia	Secara parsial variabel pertumbuhan	E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya

	pembangunan manusia dan kepadatan penduduk terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Putri, R. W., Junaidi, J., & Mustika, C. (2019).	-Tingkat Kemiskinan	-Pertumbuhan Ekonomi	ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, variabel Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan sedangkan variabel Kepadatan Penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.	dan Lingkungan Vol.8. No.2, Mei–Agustus (2019)
3.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di 9 (Sembilan) Kota Di Provinsi Jawa Timur. Yustie, R. (2020).	-Rasio Ketergantungan -Tingkat Kemiskinan	-Tingkat Pengangguran Terbuka -Investasi	Indeks pembangunan manusia, rasio ketergantungan dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Sembilan Kota di provinsi Jawa Timur Secara simultan indeks pembangunan manusia, rasio ketergantungan dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Sembilan Kota di provinsi Jawa Timur	Journal of Economics Vol. 5, No. 1, December (2020)
4.	Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Barat. Ardian, D., & Destanto, M. (2021).	-Kepadatan Penduduk -Tingkat Kemiskinan	-Pertumbuhan Ekonomi -Indeks Pembangunan Manusia -Tingkat Pengangguran Terbuka -Dana Alokasi Umum	Secara parsial variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif tidak signifikan, variabel IPM memiliki pengaruh negatif dan signifikan,	Vol 2020 No 1 (2020): Seminar Nasional Official Statistics (2020)

				variabel memiliki pengaruh signifikan dan variabel kepadatan penduduk memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Barat.	TPT tidak dan
5.	Analisis Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Rasio Ketergantungan Dan Tingkat Pendapatan Perkapita Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Lombok Tengah, Ilmiyarni, L. K., Daeng, A., & Handayani, T. (2023).	-Rasio Ketergantungan -Kemiskinan	-Pertumbuhan penduduk -Produk Regional Bruto	Pertumbuhan penduduk dan rasio ketergantungan berpengaruh positif dan signifikan, variabel tingkat pendapatan perkapita PDRB (produk regional bruto) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah.	<i>Journal Socio-Economic and Humanistic Aspects For Township And Industry</i> Vol.1 Np.4 (2023)
6.	Analisis Faktor Penyebab Kemiskinan dan Bagaimana Penanggulangannya : Studi Empiris Pada 29 Kabupaten di Jawa Tengah 2014-2020, Dwi, F. D., & Edy, G. (2021).	-Dependency Ratio -Kemiskinan	-Agishare -Industrishare -Produktivitas Tenaga Kerja -Tingkat Pengangguran Terbuka -Dana desa	Pengangguran terbuka, dependency ratio tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, sedangkan variabel agishare, industrishare, produktivitas tenaga kerja, dan dana desa berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.	Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Vol 21 No. 2, Desember (2021)
7.	Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, dan Ketimpangan Gender Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Tagulandang Biaro. Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, Dan Ketimpangangender Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Siau	-Tingkat Urbanisasi -Kemiskinan	-IPM -Pertumbuhan Ekonomi	Secara parsial variabel urbanisasi, indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.	Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol.5 No.1 (2023)

	Tagulandang Biaro, Jacobus, R. C., Engka, D. S. M., & Kawung, G. M. V. (2022).				
8.	Analisis Pengaruh Kepadatan Penduduk, Pengeluaran Perkapita Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Penduduk Miskin Di Provinsi Aceh Tahun 2000- 2019, Munira, M., & Juliansyah, H. (2022).	-Kepadatan Penduduk -Kemiskinan	-Pengeluaran perkapita -Tingkat Pengangguran Terbuka	Secara parsial variabel kepadatan penduduk tidak berpengaruh positif dan signifikan, variabel pengeluaran perkapita berpengaruh positif dan tidak signifikan sedangkan variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap penduduk miskin di Provinsi Aceh.	Jurnal Ekonomi Regional Unimal, No. 01 Volume (2022)
9.	Analisis Kepadatan Penduduk dengan Tingkat Kemiskinan di Kota Makassar. Nyompa, S., Maru, R., & Amal. (2019).	-Kepadatan Penduduk -Kemiskinan	-Jumlah Penduduk	Secara parsial variabel kepadatan penduduk dan jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kota Makassar.	Jurnal Prosiding Seminar Nasional Repository Universitas Negeri Makasar. LP2M UNM (2019)
10.	Analisis Pengaruh Ketimpangan Gender, Rasio Ketergantungan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Indonesia, Aprilia, V., & Triani, M. (2022).	-Rasio Ketergantungan -Kemiskinan	-Ketimpangan Gender -Kesehatan	Secara parsial Ketimpangan gender berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia, Rasio ketergantungan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia dan Kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.	Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan Vol 4, No 3, September (2022)

11.	Analisis Determinasi Kemiskinan 10 Kabupaten di Jawa Tengah Tahun 2017 – 2019. Aji, H. K., & Destiningsih, R. (2022).	-Rasio Ketergantungan -Kemiskinan	-Upah Minimum Kabupaten -Angkatan Kerja	Secara parsial variabel Rasio ketergantungan dan variabel angkatan kerja berpengaruh tidak signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Variabel upah minimum kabupaten (UMK) berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.	Jurnal Ilmu Ekonomi Vol 2 No 2 (2021)
12.	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Dependency Ratio terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000-2019. Nurhafizah, & Mafruhah, A. Y. (2021).	-Rasio Ketergantungan -Kemiskinan	-Pertumbuhan Ekonomi	Dalam jangka pendek dan panjang variabel rasio ketergantungan berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Barat dan variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Barat.	Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis (JRIEB) Volume 1, No. 2, Desember (2021)
13.	Pengaruh Upah Minimum, Harapan Hidup, Lama Sekolah dan Dependency Ratio Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2019. M. Candrawati, N. Imaningsih, and R. Wijaya,	-Rasio Ketergantungan -Kemiskinan	-Usia Harapan Hidup -Upah Minimum -Harapan Lama Sekolah	Secara parsial variabel upah minimum, usia harapan hidup, dan harapan lama sekolah berpengaruh positif namun tidak signifikan sedangkan variabel rasio ketergantungan berpengaruh negatif dan tidak signifikan.	Jurnal Education and Development Vol 9 No 3 (2021)
14.	Digitalisasi sebagai Faktor dalam Mengurangi Kemiskinan dan Implikasinya dalam Konteks Pandemi COVID-19. Keberlanjutan (Switzerland),	-Urbanisasi -Kemiskinan	-Indeks Gini -Pertumbuhan GDP Per Kapita	Secara parsial variabel urbanisasi dan GDP Per Kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Sub-Sahara	<i>Cogent Economics and Finance</i> Vol 10, (2022)

	Spulbar, C., Anghel, L. C., Birau, R., Ermiş, S. I., Treapăt, L. M., & Mitroi, A. T. (2022).			Afrika, sedangkan variabel indeks gini berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Sub-Sahara Afrika.	
15.	Dampak Perdagangan Luar Negeri dan Urbanisasi terhadap Pengurangan Kemiskinan: Bukti Empiris dari Tiongkok, Wang, X., Yan, H., Libin, E., Huang, X., Wen, H., & Chen, Y. (2022).	-Urbanisasi -Kemiskinan	-Perdagangan Luar Negeri	Secara parsial variabel urbanisasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan, sedangkan variabel perdagangan luar negeri memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.	<i>Journal Sustainability</i> Vol 14 (2022)

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Hubungan Urbanisasi dengan Kemiskinan

Urbanisasi, yang umumnya dipahami sebagai perpindahan penduduk dari pedesaan ke perkotaan, memiliki peran ganda dalam pembangunan ekonomi. Di satu sisi, pekerja terdidik yang bermigrasi ke kota dapat menemukan peluang di sektor pekerjaan formal. Di sisi lain, mereka yang tidak memiliki keterampilan yang cukup sering kali berakhir di sektor informal atau bahkan tetap menganggur. Migrasi perkotaan yang berkelanjutan dapat menyebabkan saturasi pasar kerja di perkotaan, yang mengakibatkan baik pekerja terdidik maupun tidak terdidik kesulitan mencari pekerjaan. Kelebihan penduduk ini menciptakan tekanan ekonomi, menjadikan kota sebagai pusat pengangguran tersembunyi dan memperburuk tingkat kemiskinan yang sudah ada. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Solomon Ahimah-Agyakwah et al. (2022) menunjukkan bahwa urbanisasi, meskipun umumnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, juga dapat memperburuk ketimpangan, terutama ketika disertai dengan infrastruktur dan

tata kelola yang tidak memadai. Demikian pula, dalam studi mereka di Tiongkok, Xingying Wang et al. (2022) menemukan bahwa urbanisasi mengurangi kemiskinan ketika dikombinasikan dengan kebijakan perdagangan yang efektif, namun di wilayah yang dukungan kelembagaannya kurang, urbanisasi justru memicu tantangan sosial dan ekonomi yang lebih besar. Dampak urbanisasi di Indonesia tidak selalu memberikan manfaat yang merata. Urbanisasi mungkin dapat meningkatkan status ekonomi individu di pusat-pusat perkotaan, tetapi pengaruhnya terbatas di wilayah pedesaan, di mana hampir setengah dari penduduk Indonesia tinggal. Seperti yang disoroti oleh Munira et al. (2022), kemiskinan di pedesaan tetap menjadi masalah krusial, terutama di daerah yang tidak terkena dampak limpahan ekonomi dari proses urbanisasi di kota terdekat. Oleh karena itu, urbanisasi sendiri mungkin tidak cukup efektif untuk mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan, di mana mayoritas penduduk miskin Indonesia berada.

2.2.2 Hubungan Kepadatan Penduduk dengan Kemiskinan

Jumlah penduduk yang besar seringkali dipandang sebagai tantangan dalam pembangunan ekonomi, karena dapat mengurangi pendapatan per kapita, memperburuk masalah ketenagakerjaan, dan menambah beban sosial. Namun, dari sisi lain, jumlah penduduk yang besar juga dapat menjadi pendorong pembangunan ekonomi, dengan menciptakan pasar yang lebih luas, meningkatkan permintaan barang dan jasa, serta menyediakan tenaga kerja dalam jumlah besar. Sebagaimana dinyatakan oleh Todaro dan Smith (2006), pertumbuhan penduduk dapat memunculkan dua efek utama. Di satu sisi, peningkatan jumlah penduduk seringkali memperlambat pembangunan karena terbatasnya sumber daya yang

tersedia untuk mendukung kebutuhan populasi yang besar. Dalam hal ini, penduduk dianggap sebagai beban, terutama ketika ketersediaan lapangan pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan tidak mampu mengimbangi peningkatan jumlah penduduk.

Secara keseluruhan, jumlah penduduk yang besar dapat memberikan dampak yang berbeda tergantung pada konteks kebijakan dan kualitas sumber daya manusia. Dengan strategi pembangunan yang tepat, populasi yang besar dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan.

2.2.3 Hubungan Rasio Ketergantungan dengan Kemiskinan

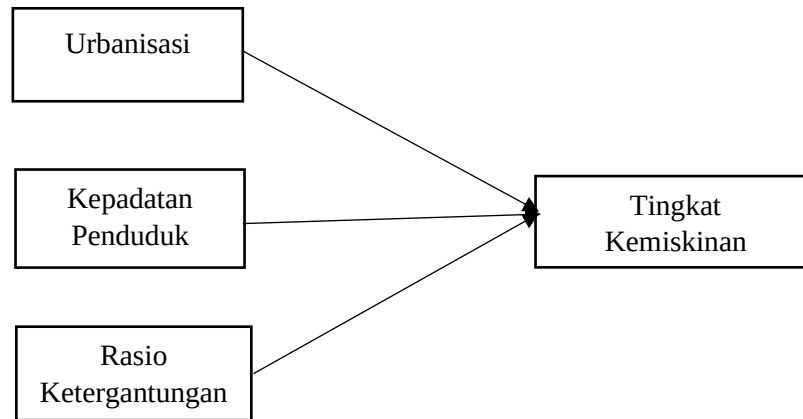
Menurut Arsyad (2010), pesatnya laju pertumbuhan penduduk di negara-negara berkembang mengakibatkan peningkatan proporsi penduduk yang belum dewasa serta bertambahnya ukuran rata-rata keluarga. Hal ini memperbesar angka beban tanggungan atau *dependency ratio*, yaitu rasio antara penduduk yang tidak produktif (belum atau tidak lagi mampu bekerja) dengan penduduk usia produktif yang terlibat dalam proses produksi. Semakin rendah *dependency ratio*, semakin kecil beban ekonomi yang ditanggung oleh penduduk produktif untuk mendukung mereka yang tidak produktif. Namun, ketika *dependency ratio* meningkat tanpa diimbangi dengan penciptaan lapangan pekerjaan yang memadai, hal ini dapat memperparah tingkat kemiskinan. Tingginya *dependency ratio* memperbesar tekanan pada angkatan kerja yang terus bertambah setiap tahunnya, menciptakan tantangan besar dalam menyediakan pekerjaan yang cukup. Jika tidak dikelola dengan baik, ketidakseimbangan ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan

memperdalam kesenjangan sosial, yang pada akhirnya meningkatkan angka kemiskinan. Penelitian sebelumnya mendukung pandangan ini. Misalnya, Nurhafizah et al. (2021) menemukan bahwa rasio ketergantungan (*dependency ratio*) memiliki dampak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, terutama ketika pertumbuhan ekonomi tidak mampu menyerap tambahan angkatan kerja yang berasal dari penduduk usia produktif. Via Aprilia (2022) juga menunjukkan bahwa meskipun *dependency ratio* memiliki dampak positif terhadap kemiskinan, efek ini dapat diperburuk oleh kurangnya kesempatan kerja, yang menambah beban ekonomi bagi keluarga yang harus menanggung lebih banyak tanggungan.

Dengan demikian, peningkatan *dependency ratio* harus disertai dengan kebijakan pembangunan ekonomi yang mampu menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan, guna mengurangi dampaknya terhadap kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kerangka pemikiran penulis dalam penelitian ini adalah tingkat kemiskinan sebagai variabel dependen yang dipengaruhi oleh Urbanisasi, Kepadatan Penduduk dan Rasio Ketergantungan.

Berikut ini adalah kerangka pemikiran dalam penelitian ini:



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan sebuah dugaan sementara dalam suatu penelitian. Berdasarkan kerangka pemikiran dan paradigma penelitian pada halaman sebelumnya, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial Kepadatan Penduduk, Rasio Ketergantungan berpengaruh positif, sedangkan Urbanisasi berpengaruh negatif Terhadap Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2006-2023.
2. Diduga secara bersama-sama Urbanisasi, Kepadatan Penduduk dan Rasio Ketergantungan berpengaruh terhadap Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2006-2023.